



Kebijakan Harga BBM dan Dampak pada APBN, Ekonomi dan Sosial

**KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
DEPARTEMEN KEUANGAN, RI**

Jakarta, 15 Mei 2008

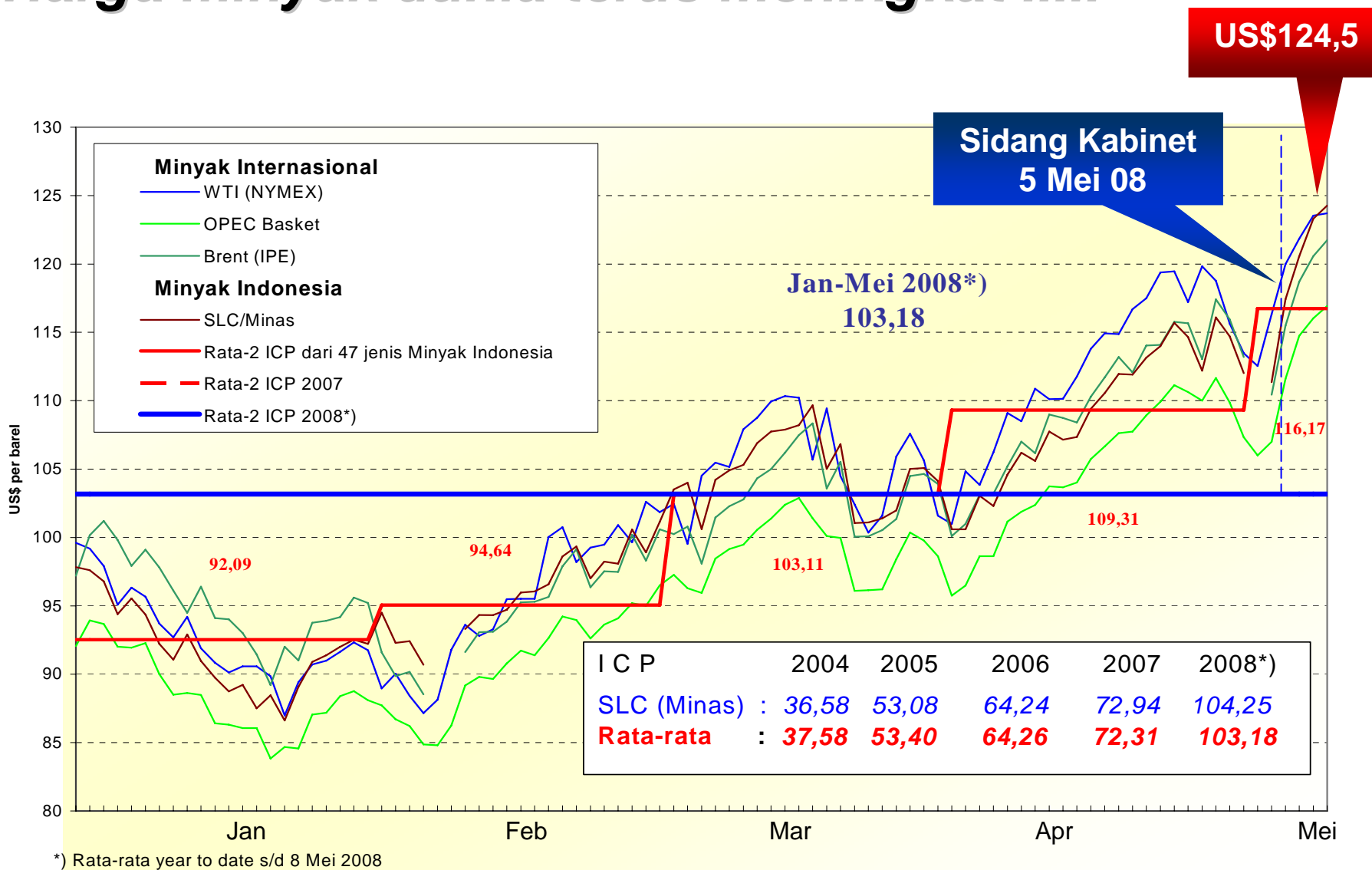


Outline

- Perkembangan Harga Minyak dan Upaya-Upaya yang telah dilakukan
- Dampak Sosial dan Ekonomi
- Dampak Kenaikan Harga BBM pada Postur APBN-P 2008 dan RAPBN 2009



Harga minyak dunia terus meningkat

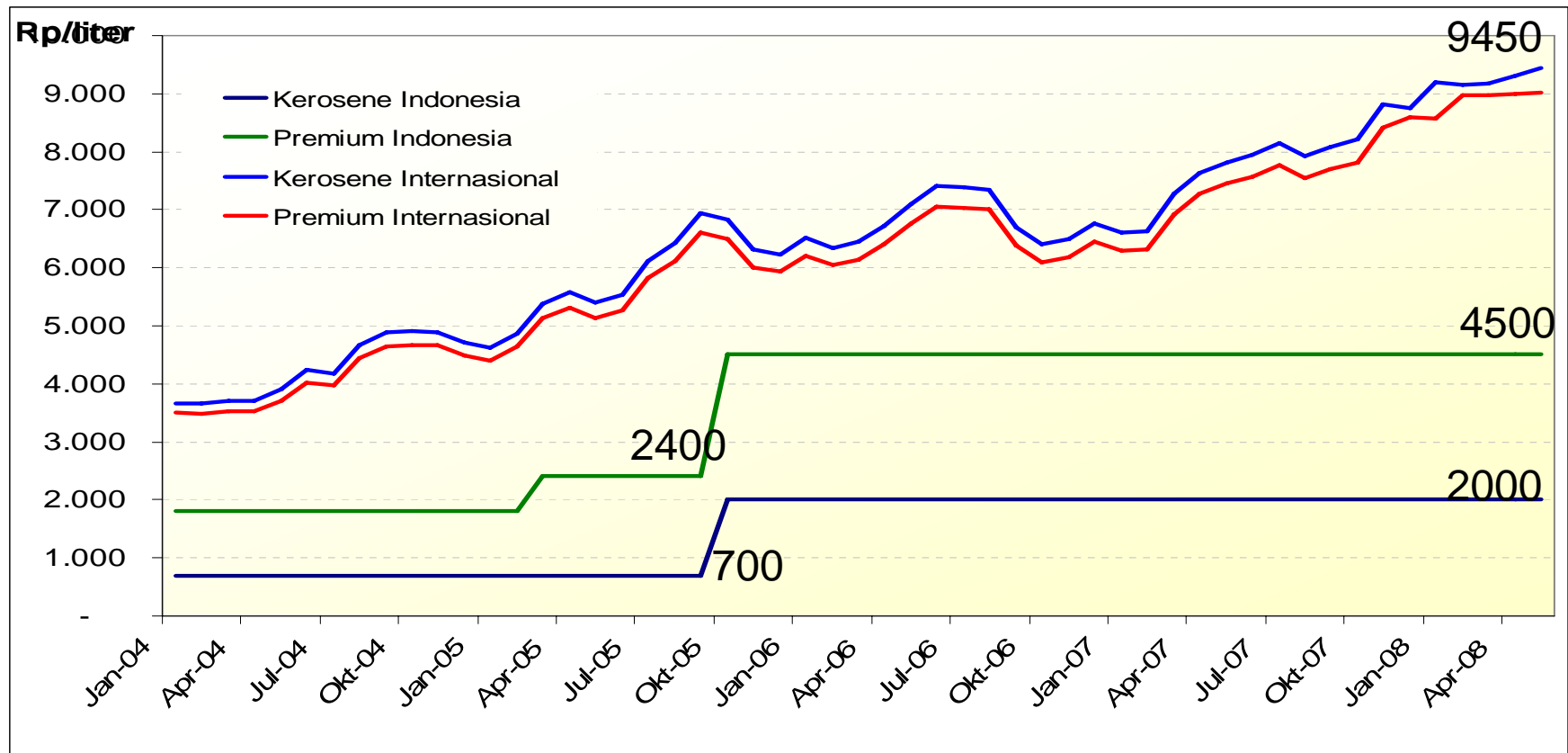


Sumber: Departemen ESDM



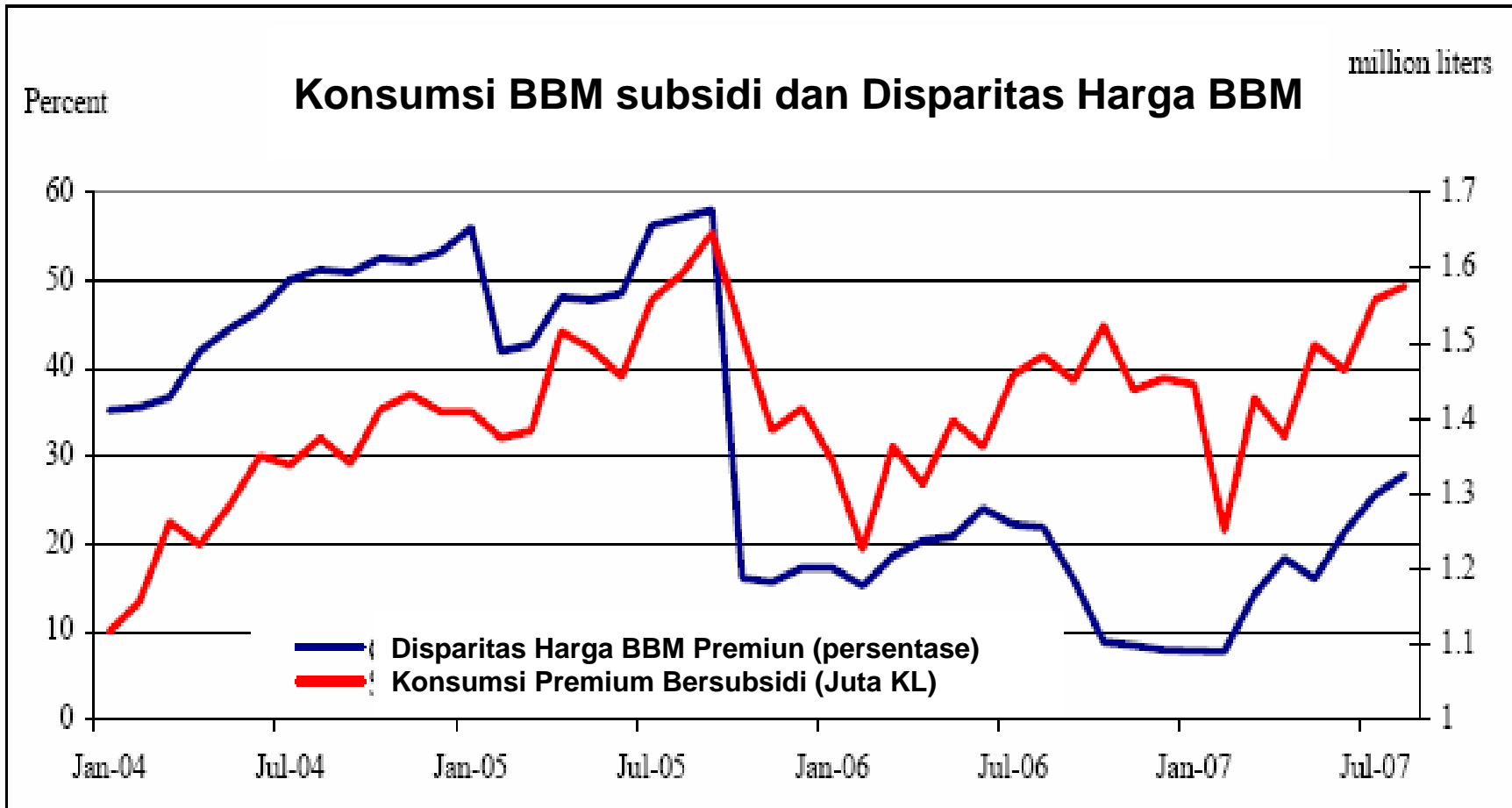
Akibatnya, perbedaan harga domestik dan internasional melebar.....

Harga Domestik dan Harga Internasional





...perbedaan ini menyebabkan konsumsi BBM tidak terkendalikan





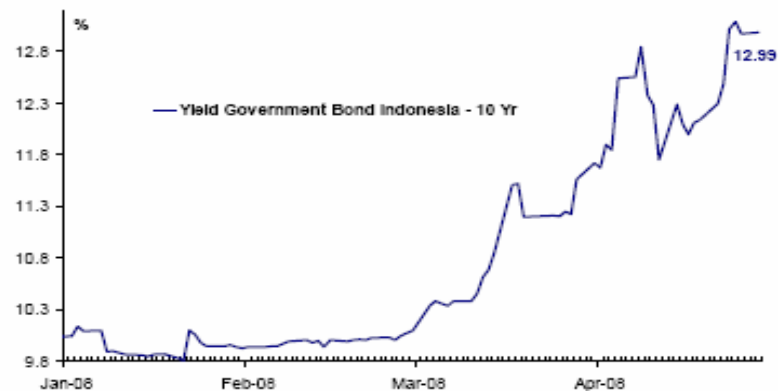
Mengakibatkan telah terjadi Erosi Kepercayaan di Pasar.....

Indeks harga Saham terus menurun



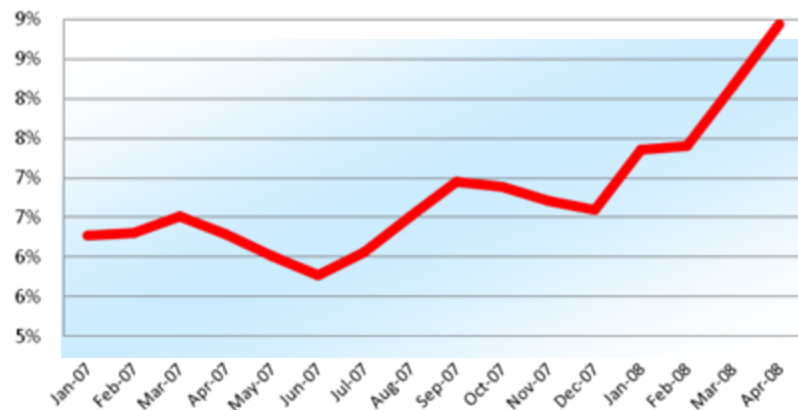
Yield SUN di pasar Domestik meningkat tajam sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia

Yield SUN 10 tahun



Rupiah menunjukkan anomali dibandingkan mata uang lainnya

Perkembangan Inflasi 2007-2008



Inflasi meningkat tajam ... akibat tekanan instabilitas makro



..kepercayaan belum pulih walaupun sejumlah langkah telah/akan dilakukan

1. Penghematan belanja K/L sudah dilakukan Rp30,3 triliun
2. Penerimaan negara non-migas sudah dioptimalkan Rp 20 triliun
3. Belanja risiko fiskal sudah digunakan Rp8,3 triliun
4. Target penerbitan SBN Rp157 triliun. Sampai dengan Mei 2008 hanya berhasil diterbitkan Rp57,8 triliun dengan suku bunga 2,5 – 3,5 persen lebih tinggi
5. Tambahan pinjaman program (ADB, Bank Dunia, dan bilateral) telah diupayakan secara maksimal Rp25 triliun
6. Langkah-langkah optimalisasi penerimaan migas
 - Peningkatan lifting minyak 916 → 927 ribu KL

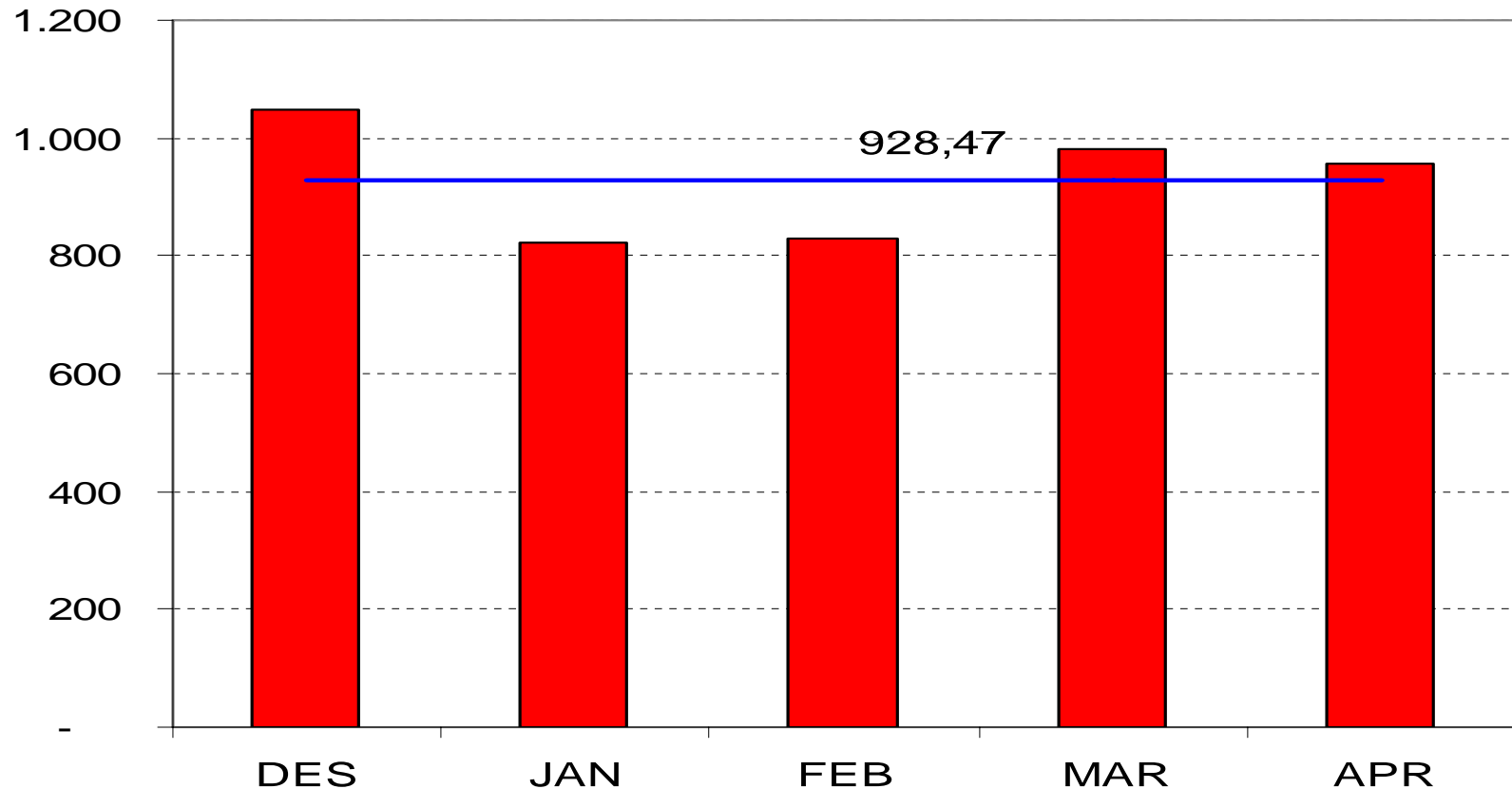


7. Langkah-langkah penghematan BBM dan listrik sudah dilakukan

- Konversi minyak tanah ke LPG: 1 juta KI- 2 juta KI, target 2008 dan 2009 seluruh Jawa harus sudah selesai; Seluruh potensi swasta dan BUMN
- Penghematan konsumsi listrik dan biaya PLN Rp 5 triliun (sistem insentif jalan, LHE, gasifikasi pembangkit, MFO nisasi, dan menurunkan losses)
- Penghematan konsumsi BBM dan efisiensi Pertamina Rp 7 triliun (penurunan alpha)
- Pembatasan konsumsi BBM melalui pelaksanaan smart card dan kartu kendali
- Penghematan energi di kantor pemerintah, mall, hotel, shopping center, dan jam tayang TV.
- Pembentukan tim nasional penghematan energi listrik dengan target yang jelas

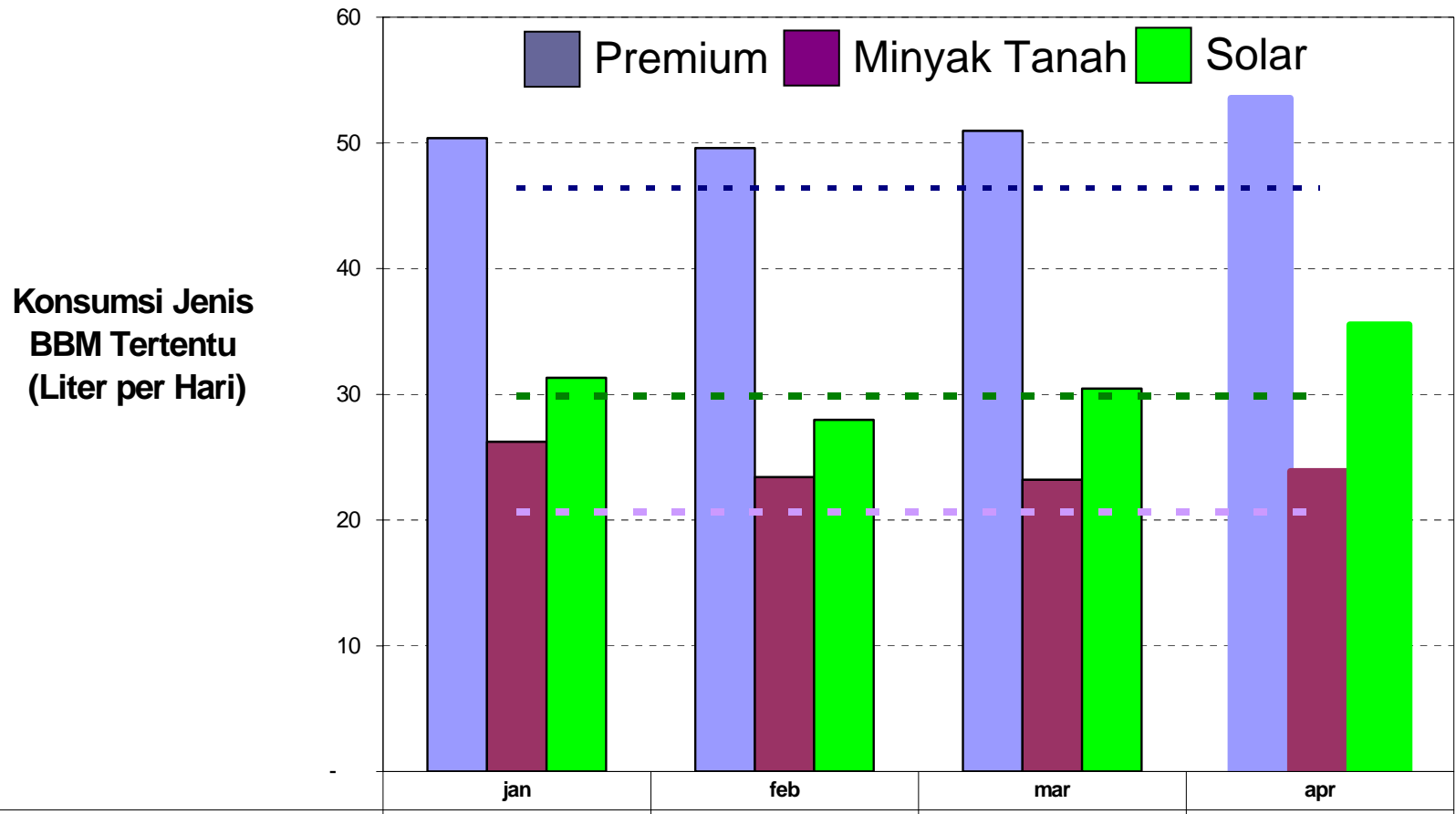


Lifting minyak terus dioptimalkan: dalam 2 bulan terakhir di atas rata-rata





PERKEMBANGAN KONSUMSI BBM Bersubsidi

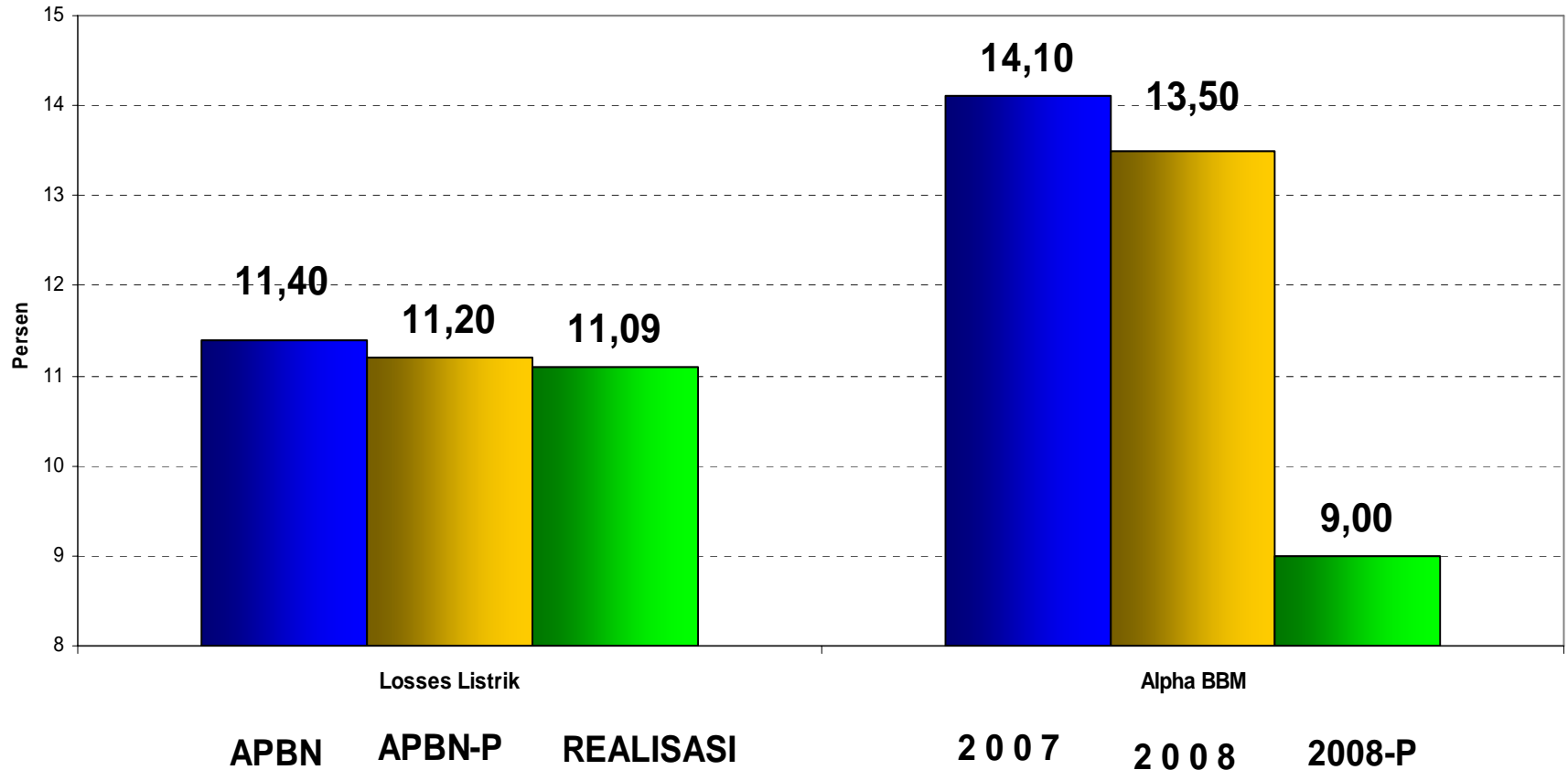


Konsumsi BBM bulan April '08 meningkat cukup tajam.

Diperlukan upaya untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi melalui penerapan smart card dan kartu kendali. Uji coba dan pendataan konsumsi BBM akan dimulai sejak bulan September 2008. Persiapan awal telah berlangsung.



Efisiensi Pertamina dan PLN berlanjut

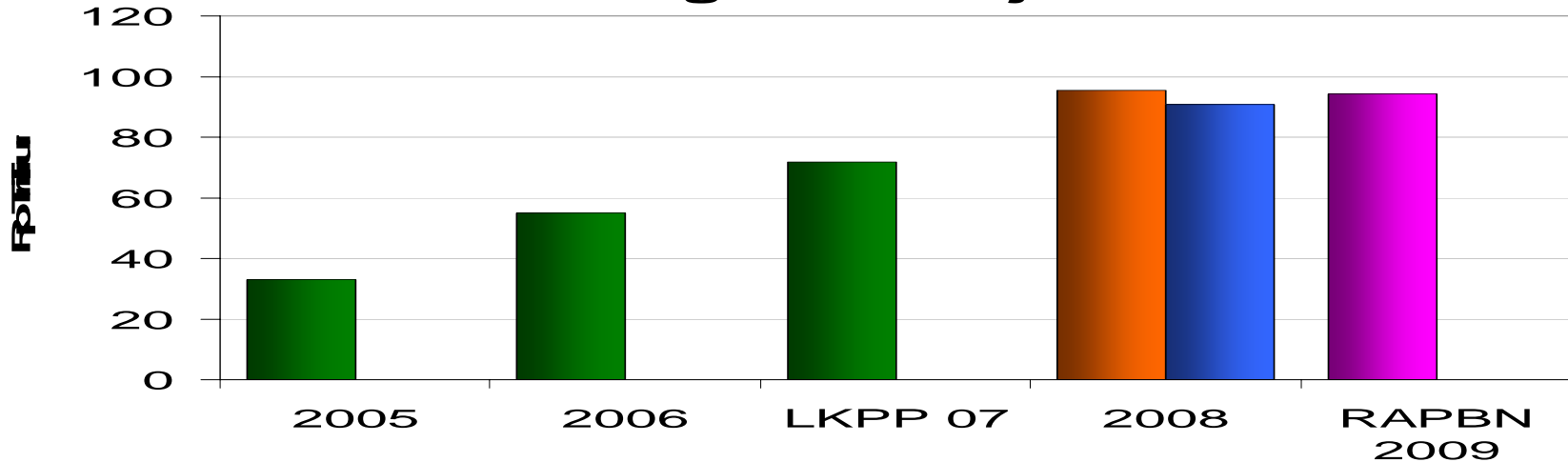


Pada harga ICP di atas US\$100 akan diberlakukan angka alpha (distribusi + margin) Pertamina “dengan nominal tetap setara dengan alpha 9%”. Penghematan subsidi BBM sekitar Rp1,8T. Alpha Pertamina untuk kebutuhan BBM PLN adalah 5%

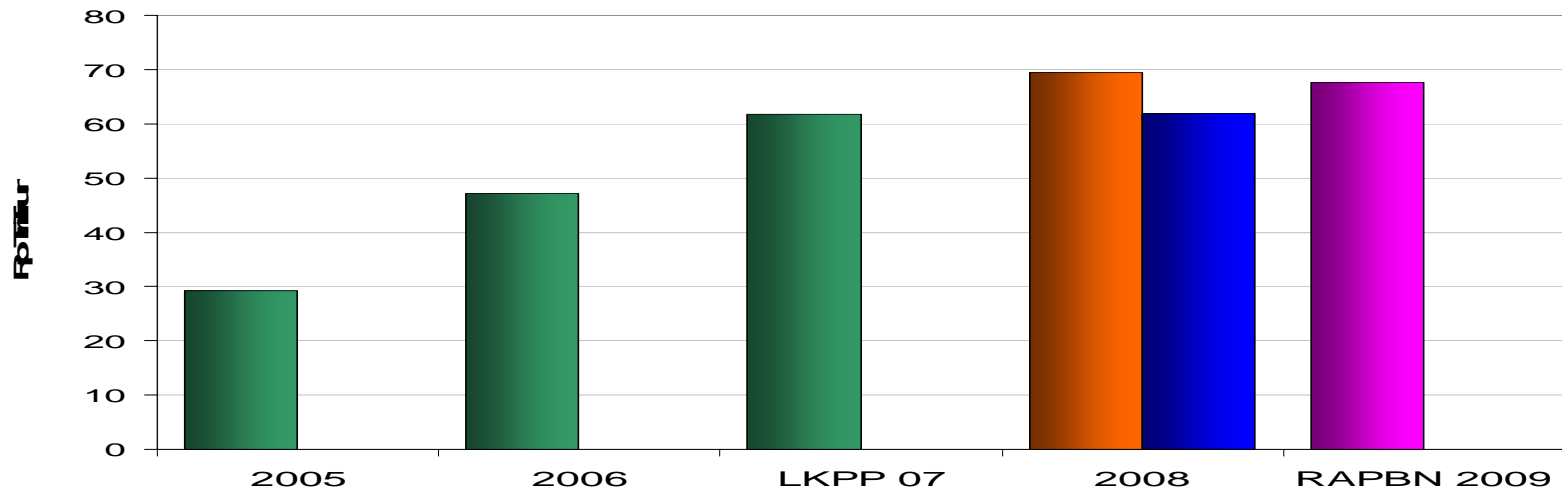


Belanja Modal dan Barang 2008 telah dipotong 10% dan penundaan belanja barang mengikat, termasuk perjalanan dinas 5%

Perkembangan Belanja Modal



Perkembangan Belanja Barang





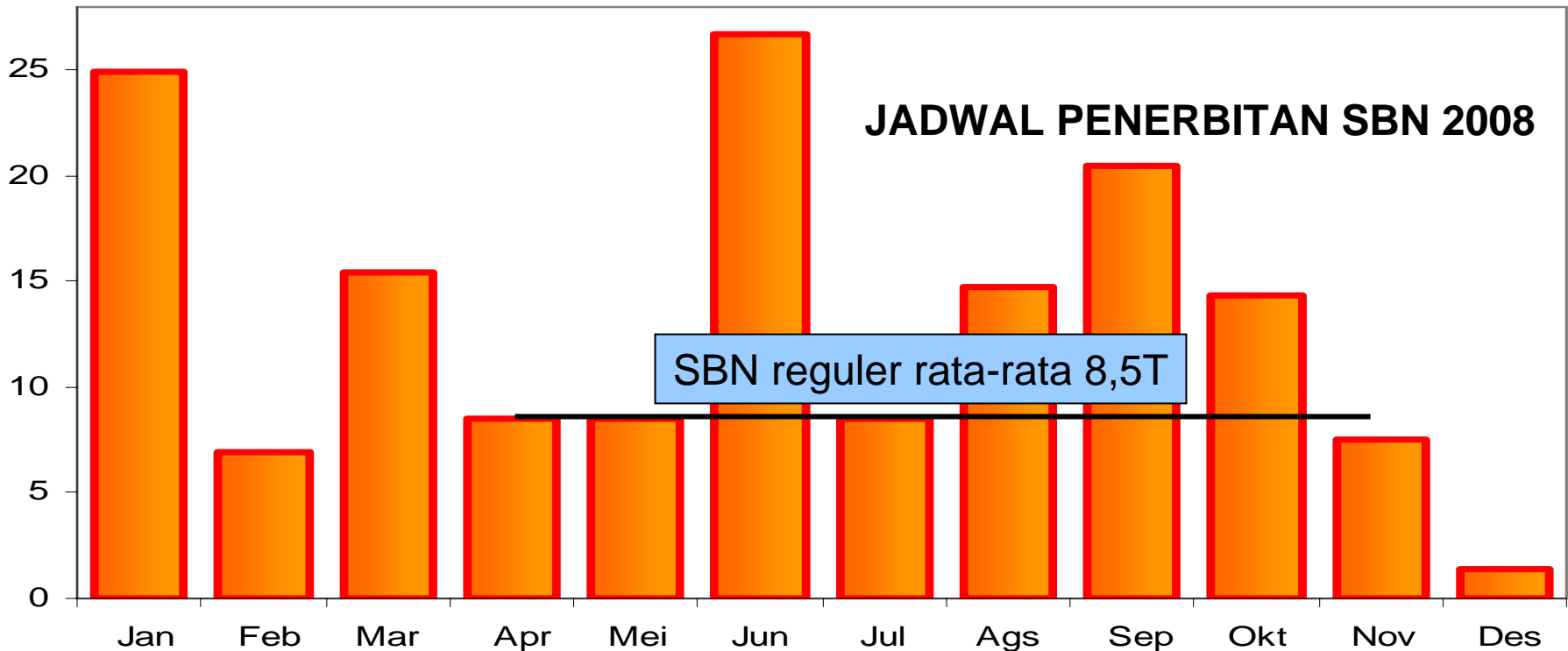
Langkah-langkah Penghematan Oleh K/L Terkait Dengan Pengurangan Subsidi Energi

1. Menunda belanja barang mengikat K/L sekitar 5%, termasuk belanja perjalanan dinas, penghematan penggunaan dan biaya listrik, air, telepon, dan belanja langganan daya dan jasa lainnya → tidak mengurangi pagu K/L.

2. Himbauan (*moral suasion*) :
 - Penurunan status akomodasi perjalanan dinas, dari *business class* ke *economy class*, dari hotel bintang 4 ke hotel bintang 3
 - Penundaan (pemblokiran) pengadaan kendaraan operasional → pengadaan dengan cc kecil,
 - Pembatasan rapat kerja → diadakan di instansi masing-masing



Saat ini penurunan kepercayaan pasar telah meningkatkan biaya peminjaman sebesar 300 bps. Meskipun lebih sulit dan mahal, penerbitan SBN tetap diupayakan memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit APBN



Program penerbitan SBN meliputi:
Penerbitan SBN Reguler, Retap Obligasi, VALAS, ORI, SUKUK Valas dan Rupiah dan SPN



.... tanpa kebijakan, Subsidi Energi dalam APBN 2008 membengkak dan tidak dapat dibiayai, serta menambah beban di 2009

Indikator Ekonomi	APBN-P 2008	Tanpa Kebijakan 2008	Tanpa Kebijakan 2009
Inflasi (%)	6.5	13.2	14.6
Nilai tukar (Rp/US\$)	9,100.0	9,600.0	10,000.0
SBI 3 bulan (%)	7.5	12.0	15.5
Harga Minyak (US\$/barell)	95.0	110.0	110.0
Lifting Minyak (Jt brl/hr)	0.927	0.927	0.950
Konsumsi BBM bersubsidi (juta KL)	35.5	39.0	40.0
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.4	5.8	5.0
Subsidi BBM (Triliun Rp)*	126.8	190.5	204.1
Defisit APBN (Triliun Rp)	94.5	125.3	158.9
Defisit Tidak Terbiayai (Triliun Rp)	0	35.6	69.5
Kemiskinan (% Penduduk)	14,8-16,0	14,8-15,0	19.5

Alokasi subsidi BBM maksimal yang diperkenankan dalam APBN-P 2008 adalah Rp135,1T (pasal 7 UU No. 16 tahun 2008 tentang APBN-P 2008)



Keputusan dalam UU APBN-P 2008

Subsidi BBM

Pasal 7 ayat (1a):

Tambahan alokasi belanja subsidi BBM paling banyak Rp8.254,0 milyar dari realokasi dana cadangan umum risiko fiskal

Pasal 14 ayat (2):

Dalam hal terjadi perubahan harga minyak yang sangat signifikan dibandingkan asumsi harga minyak yang ditetapkan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan di bidang subsidi BBM dan/atau langkah-langkah lainnya untuk mengamankan pelaksanaan APBN 2008

Penjelasan atas pasal 14 ayat (2):

Yang dimaksud dengan “perubahan yang signifikan” adalah apabila perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam satu tahun di atas US\$100 per barel yang berdampak pada pelampauan beban subsidi

Yang dimaksud dengan “langkah-langkah kebijakan dan/atau langkah-langkah lainnya” meliputi langkah-langkah kebijakan dalam rangka pengendalian volume BBM bersubsidi, kebijakan harga BBM bersubsidi, dan/atau kebijakan fiskal lainnya yang terkait



SKENARIO KENAIKAN HARGA BBM 30%

Dengan penyesuaian harga, pengendalian volume dan kebijakan fiskal lainnya akan diperoleh penghematan sebesar Rp34,5 Triliun yang dapat dialokasikan untuk:

- BLT (7 bulan), Raskin dan Ketahanan Pangan Rp 18,15 T
- Cadangan Risiko Fiskal dan Penurunan Defisit Rp15,2T
- Kredit Usaha Rakyat KUR Rp1T
- PSO utk Kereta Api Kelas Ekonomi Rp0,15 T



.... Dengan kebijakan kenaikan harga BBM akan memperbaiki kondisi perekonomian dan mengurangi defisit APBN

Indikator Ekonomi	APBN-P 2008	2008	2009
Inflasi (%)	6,5	11,2	5,8
Nilai tukar (Rp/US\$)	9.100,0	9.000,0	8.950,0
SBI 3 bulan (%)	7,5	8,5	7,25
Harga Minyak (US\$/barell)	95,0	110,0	110,0
Lifting Minyak (Jt brl/hr)	0,927	0,927	0,950
Konsumsi BBM bersubsidi (juta KL)*	35,5	36,2	32,6
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,4	6,0	6,5
Subsidi BBM (Triliun Rp)*	126,8	132,1	105,5
Defisit APBN (Triliun Rp)	94,5	82,3	81,3
Defisit Tidak Terbiayai (Triliun Rp)	0	0	0
Kemiskinan (% Penduduk)	14,8 - 16,0	14,8 - 15,0	12,5

Dengan stabilisasi ekonomi di tahun 2008 pasca kenaikan harga BBM dalam tahun transisi menjelang pemilu, perekonomian dapat memperbaiki iklim investasi setara dengan negara-negara tetangga.



PENGALAMAN NEGARA- NEGARA TETANGGA

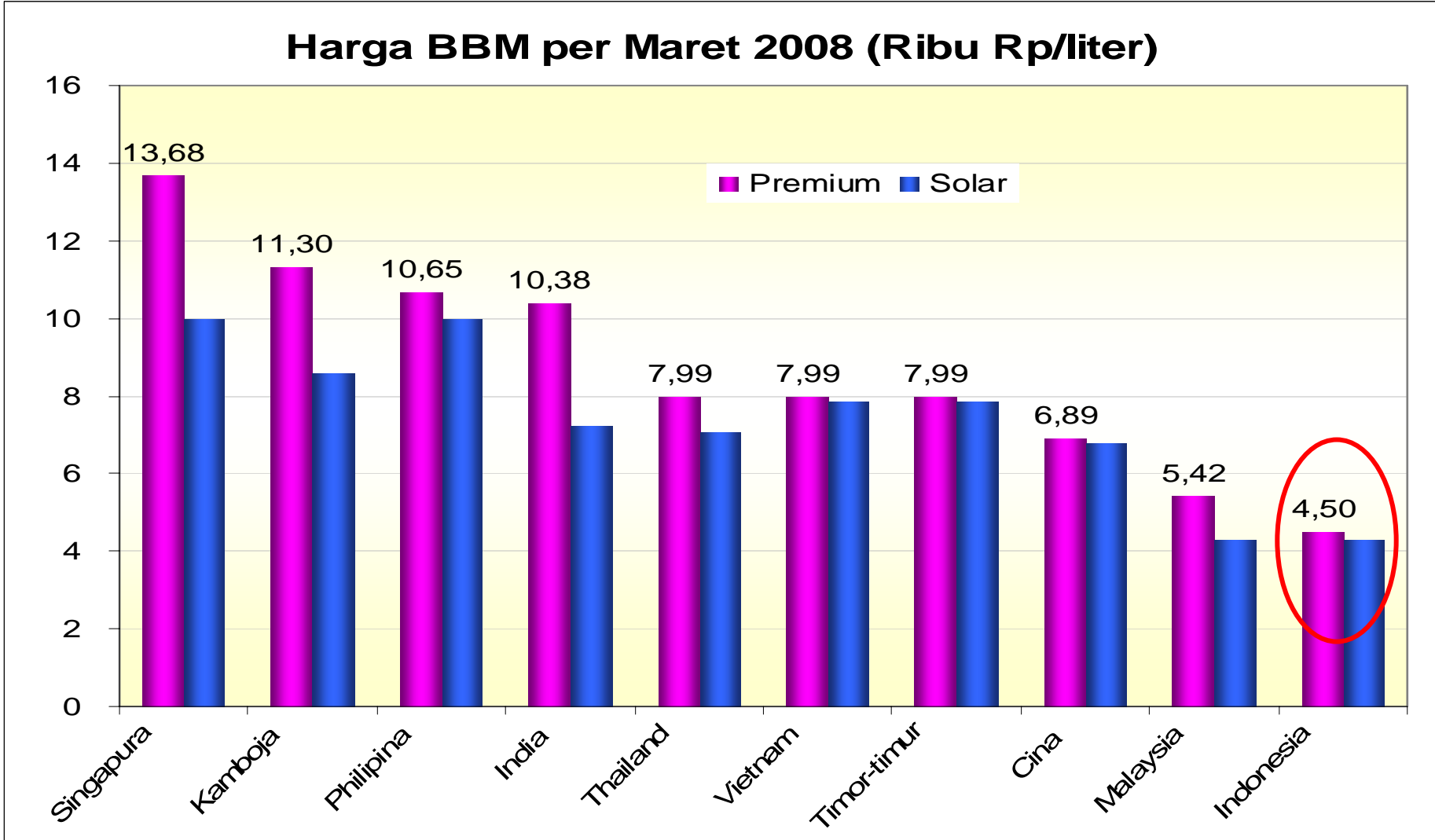


Banyak negara tetangga telah melakukan penyesuaian harga BBM secara otomatis

Negara	Mekanisme Penyesuaian Harga BBM	Rencana Selanjutnya
Malaysia	Penetapan	Merencanakan mencabut subsidi solar (Juni 08) dan selanjutnya premium.
Singapore	Otomatis/Pasar	
Thailand	Otomatis/Pasar	
Philippines	Otomatis/Pasar	
Vietnam	Penetapan	Merencanakan kenaikan 30% Juni 2008
China	Penetapan	Nov 2007 menaikkan harga BBM
Timor Timur	Otomatis/Pasar	
India	Penetapan	Merencanakan kenaikan harga
Cambodia	Otomatis/Pasar	
Indonesia	Penetapan	



Harga BBM Indonesia tergolong yang paling rendah





DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI

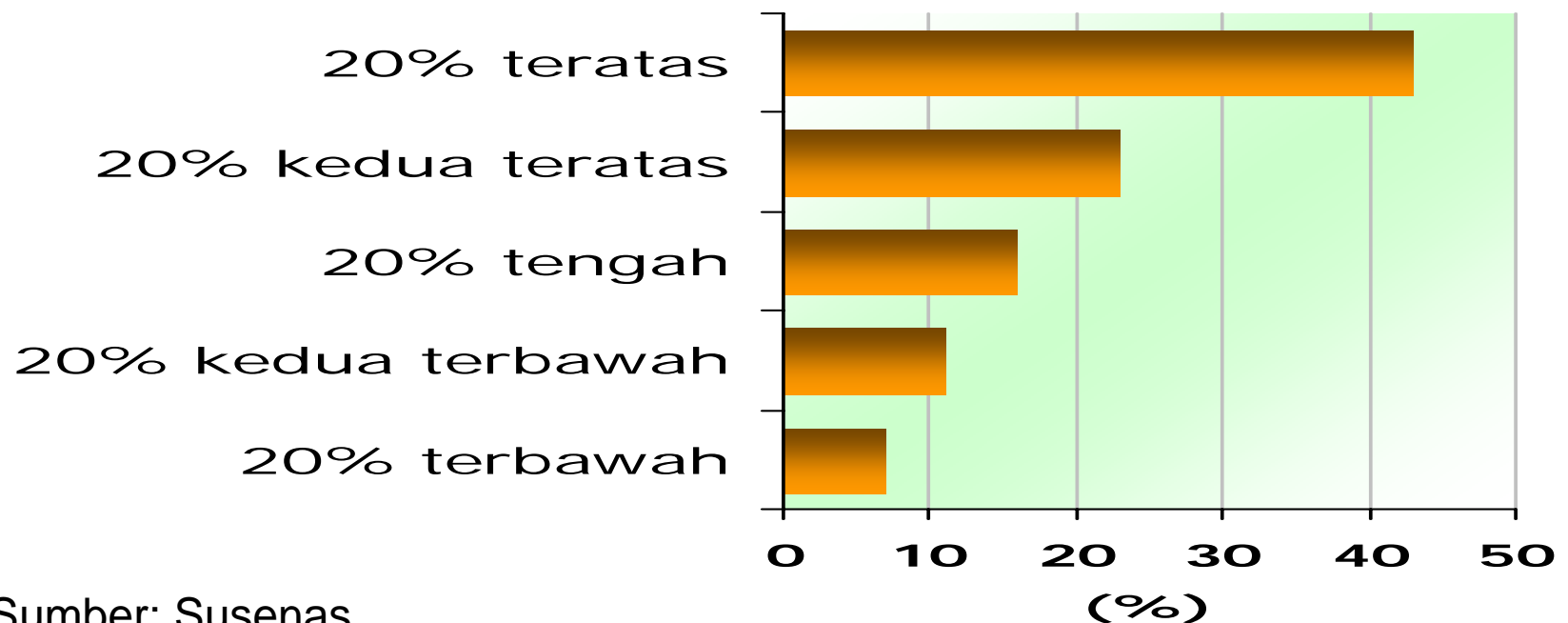


DAMPAK SOSIAL

Fakta menunjukkan saat ini 70% Subsidi BBM hanya dinikmati oleh 40% penduduk kelompok atas di Indonesia.

Kenaikan harga BBM justru akan mengalihkan kenikmatan yang selama ini diterima oleh kelompok atas kepada kelompok bawah.

Distribusi Konsumsi BBM Menurut Pendapatan Rumah Tangga



Sumber: Susenas



Dampak Sosial dengan Program Kompensasi

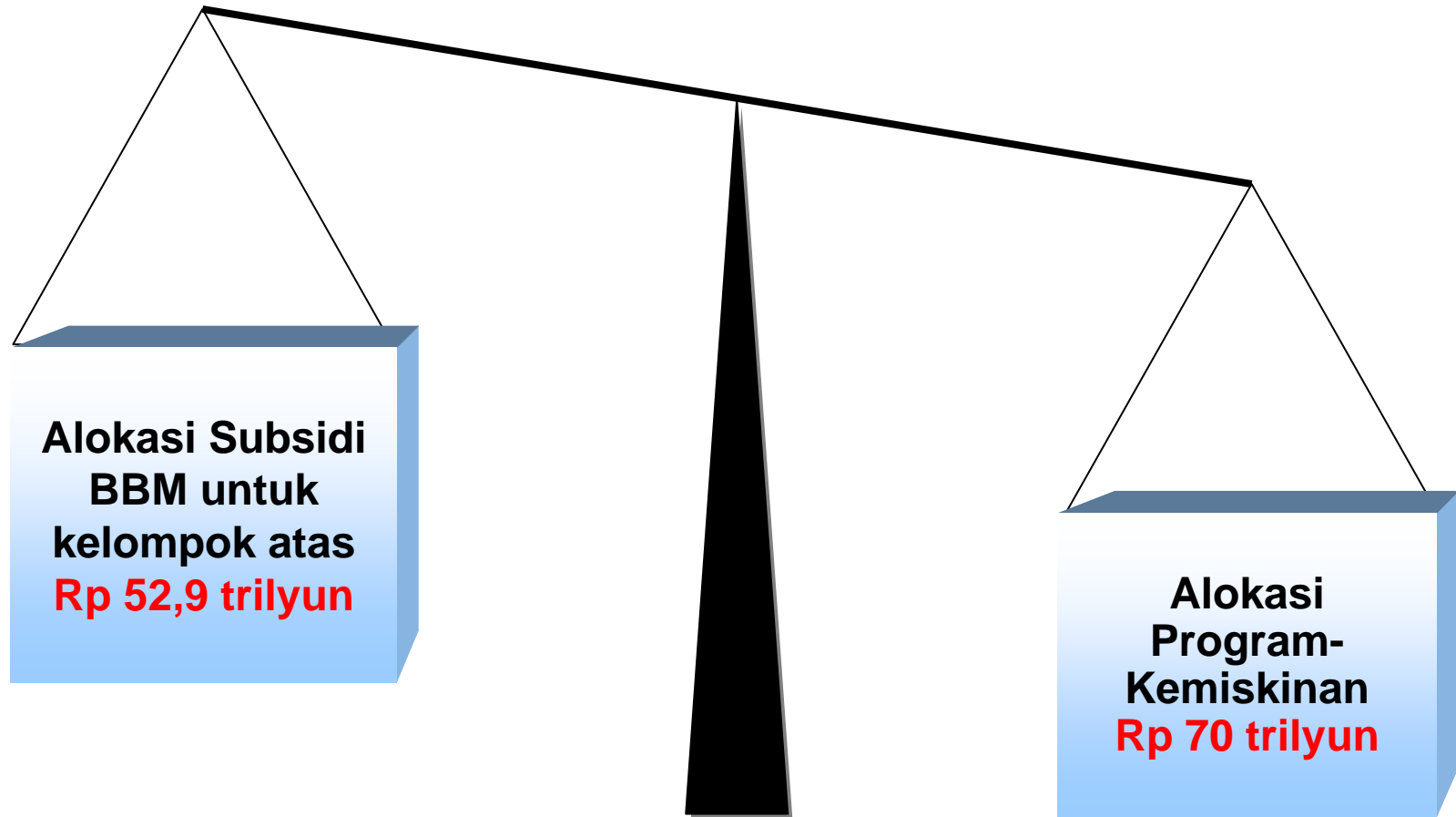
PARAMETER	TANPA PENYESUAIAN HARGA BBM	KENAIKAN HARGA BBM
Kemiskinan - 2008 (Maret) - 2009 (Maret)	14,8 – 16,0 % 19,5%	14,8 – 15,0 % 17,2 % (tanpa BLT) 12,5% (dg BLT dan paket stabilisasi harga)

Kebijakan Kompensasi dalam bentuk BLT dan pulihnya kepercayaan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dari 19,5% menjadi 12,5% (Maret 2009)

BLT diberikan 18 bulan sebesar Rp 100 ribu/bulan untuk 19,1 juta RTS

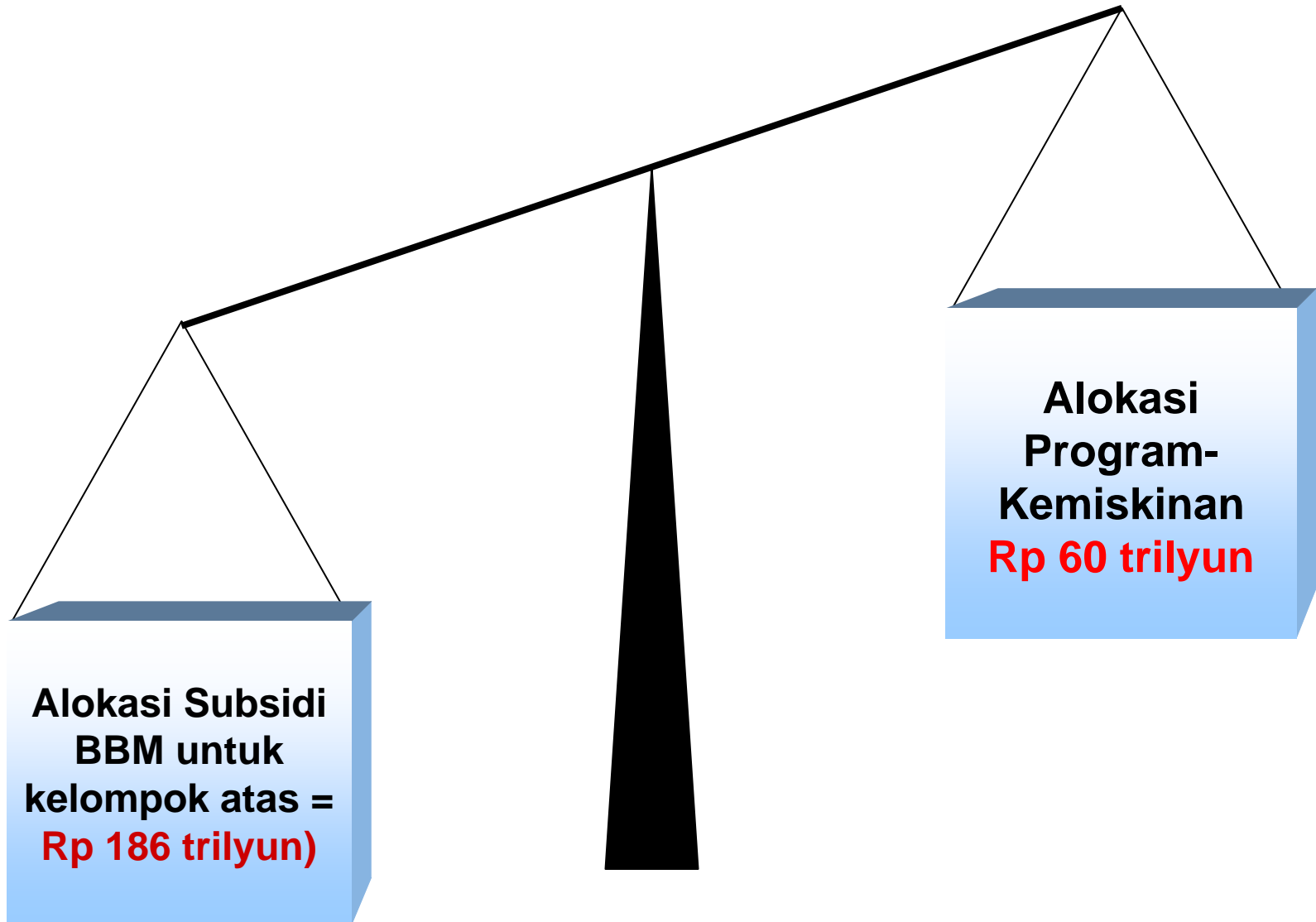


Desain awal APBN 2008 untuk menjawab pemihakan kepada golongan miskin



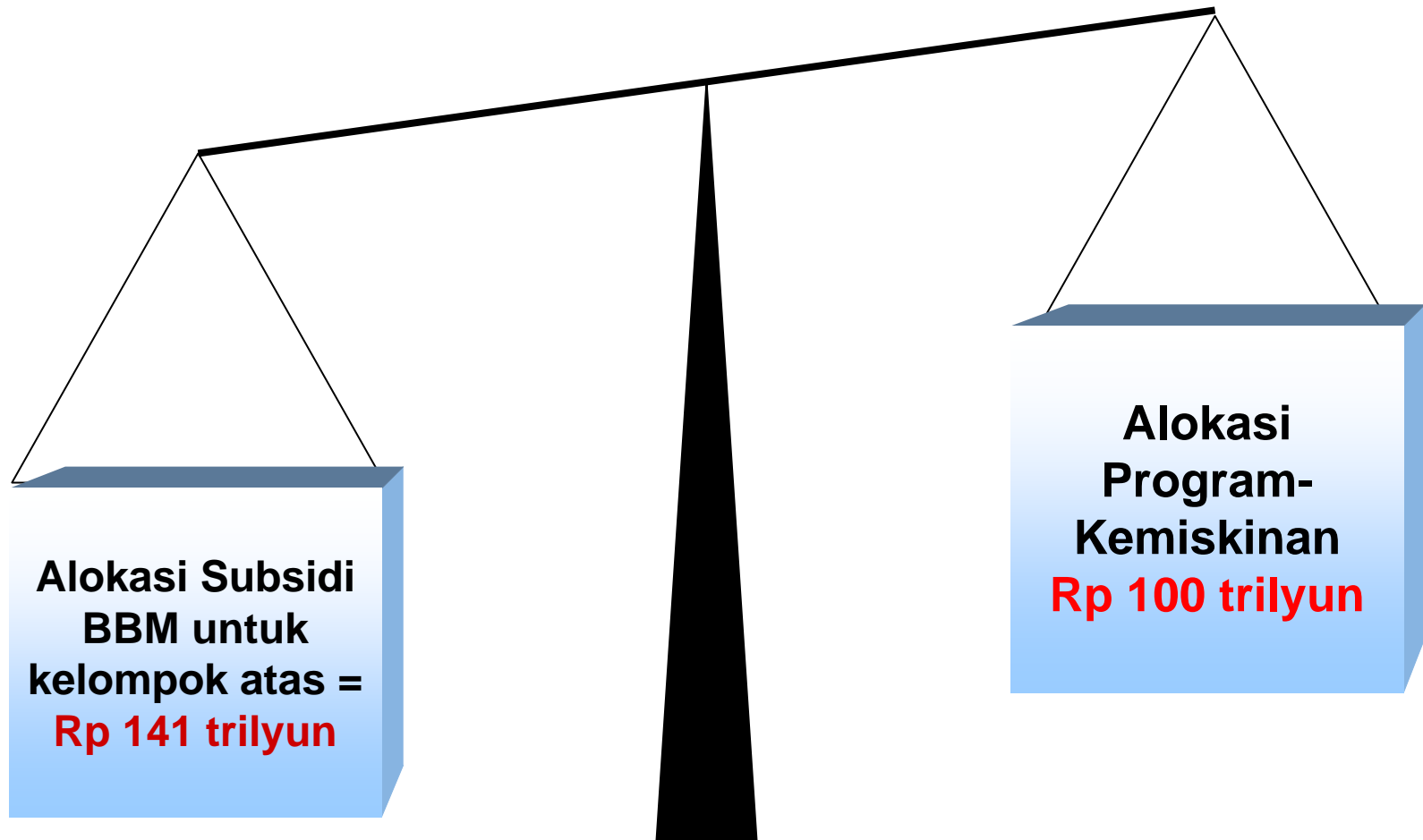


Tanpa Kebijakan, Desain APBN-P 2008 sangat tidak adil



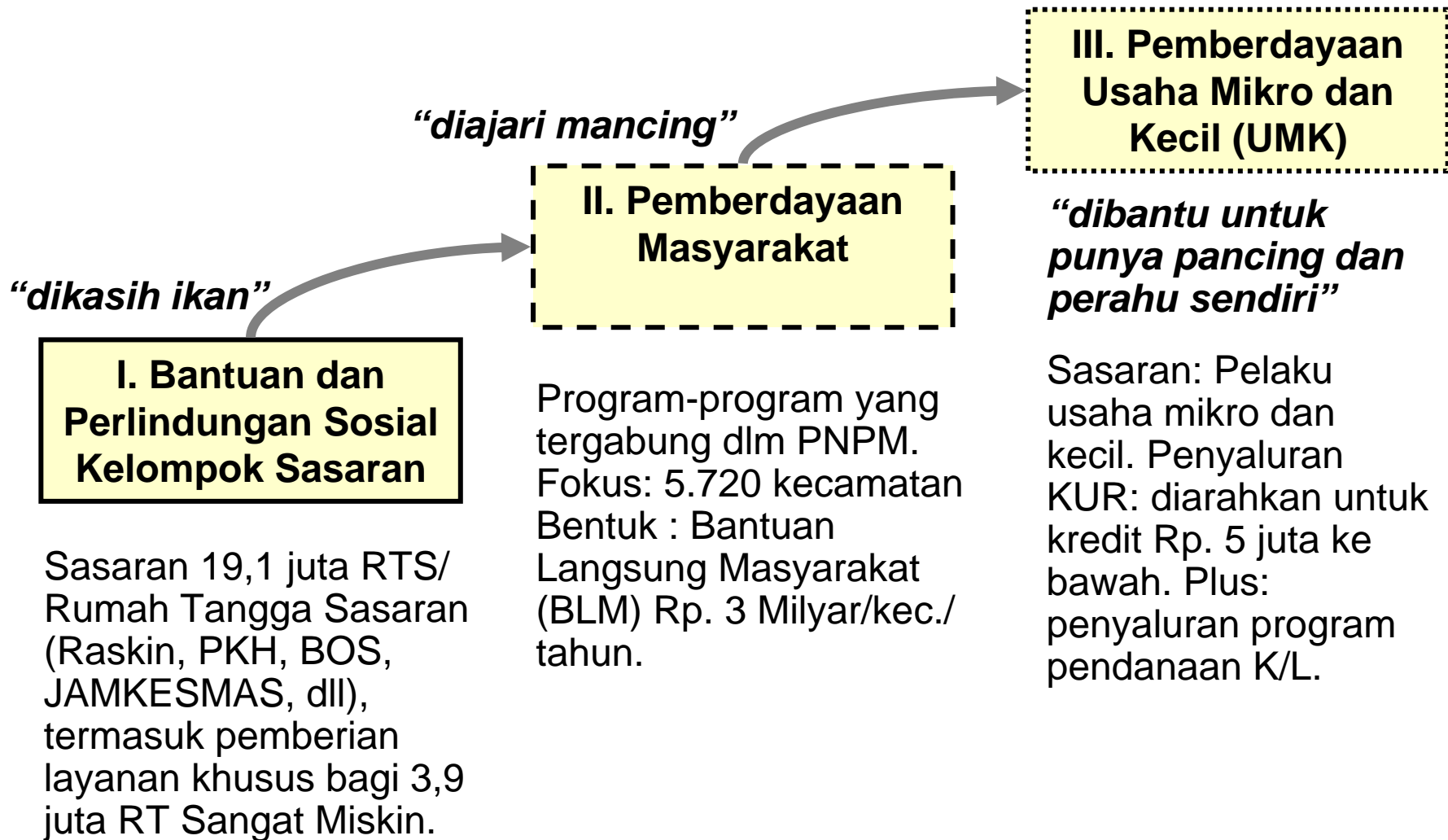


Dengan kenaikan harga BBM 28,7% mengkoreksi alokasi APBN-P 2008 menjadi lebih adil





3 Kelompok (Kluster) Program Penanggulangan Kemiskinan





Peningkatan program Penanggulangan Kemiskinan yang AKAN DILAKUKAN tahun 2008 dilakukan realokasi subsidi Kluster / Kelompok Program

**Bantuan dan
Perlindungan Sosial
Kelompok Sasaran**

**Penambahan Raskin dari
10 bulan menjadi 12 bulan,
@ 15kg/RTS/bulan untuk
19,1 juta RTS**

**Penjualan beras kualitas
medium bersubsidi untuk
buruh, PNS Gol I/II, tenaga
honorar, Tamtama
TNI/Polri, untuk 12 juta KK**

**Pasar murah BUMN dan
swasta untuk 5 juta KK,
khususnya buruh dan
masyarakat rural-urban
berpendapatan tetap**

**Pemberdayaan
Masyarakat**

**Konsolidasi dan
percepatan program
PNPM**

**+ kemungkinan realisasi
program-program yang
masih tertunda**

**+ bantuan tunai bagi RTS
sebagai kompensasi
kenaikan harga BBM**

**Pemberdayaan
Usaha Mikro dan
Kecil (UMK)**

**Percepatan
penyaluran KUR
hingga mencapai
Rp 14,1 triliun tahun
2008**



**Peningkatan program Penanggulangan Kemiskinan yang
TELAH DILAKUKAN tahun 2008 yang juga bertujuan untuk meredam
dampak kenaikan harga minyak internasional
TANPA MENAIKKAN harga BBM dalam negeri**

Kluster / Kelompok Program

**Bantuan dan
Perlindungan Sosial
Kelompok Sasaran**

Penambahan Raskin,
10 kg → 15
kg/RTS/bulan untuk
19,1 juta RTS, selama
10 bulan

Penjualan minyak
goreng dan kedele
bersubsidi

Pasar murah oleh
BUMN

Stabilisasi harga
pangan

**Pemberdayaan
Masyarakat**

Konsolidasi dan
percepatan program
PNPM

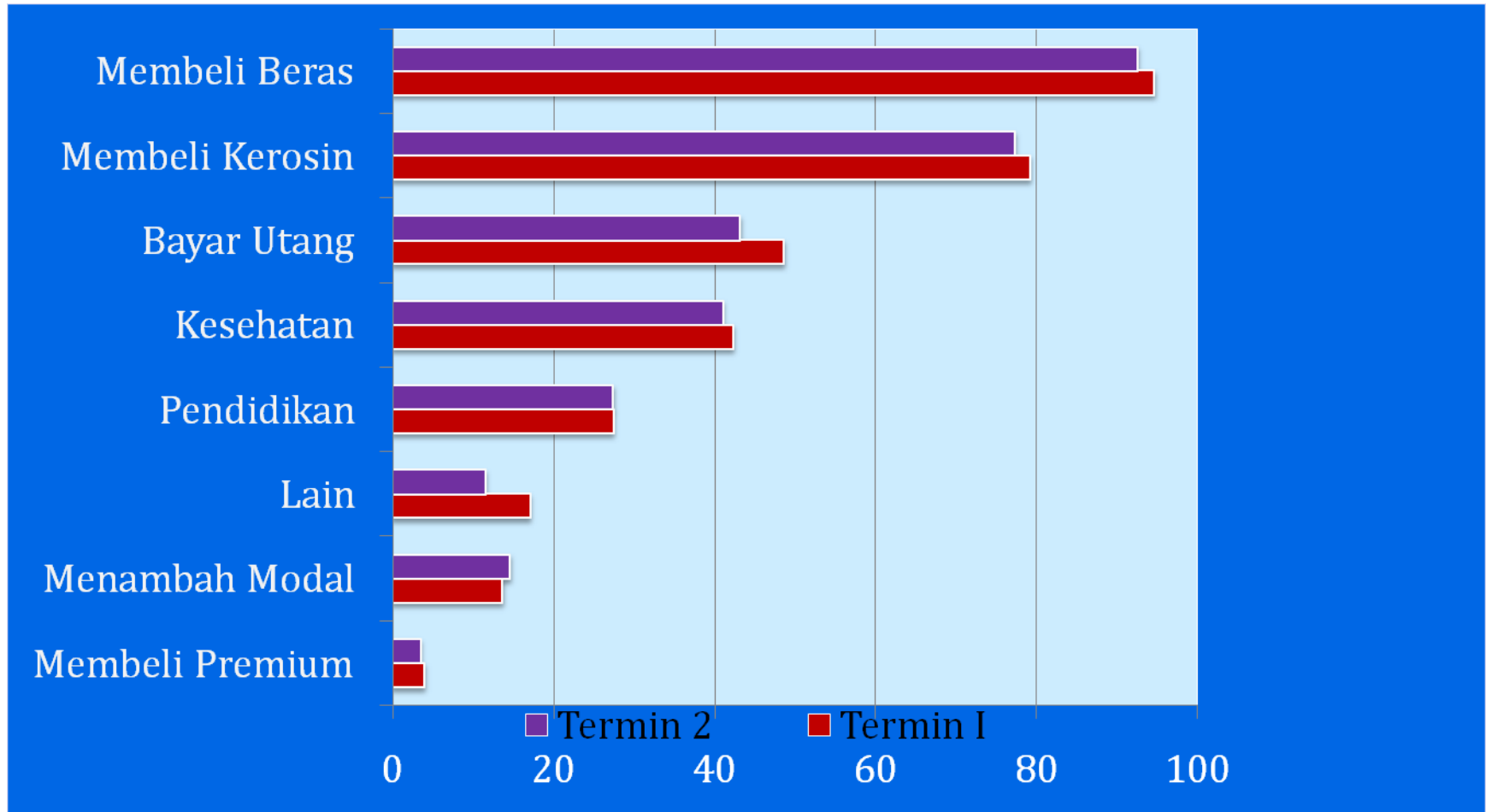
**Pemberdayaan
Usaha Mikro dan
Kecil (UMK)**

Re-fokus dan
percepatan KUR
pada layanan kredit
dibawah Rp 5 juta
(saat ini KUR telah
terrealisasi Rp 5,2 T
dengan sekitar
400.000 nasabah)



Bantuan tunai bagi RTS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM

Bantuan tunai memberi manfaat langsung bagi peningkatan daya beli kebutuhan pokok

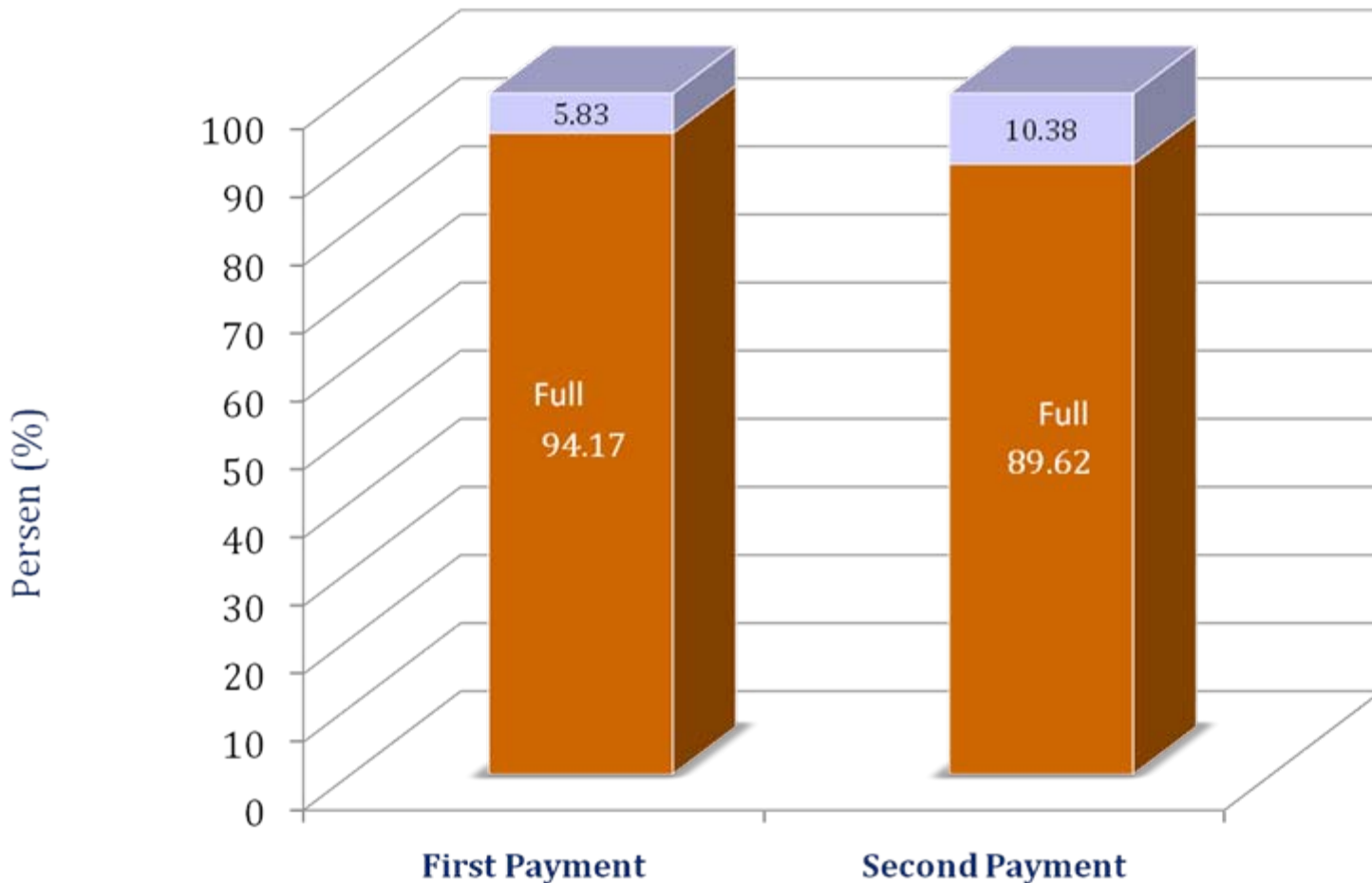


Sumber data: BLT 2005, Susenas 2006, diolah



Bantuan tunai bagi RTS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM

Sebagai program bantuan, sangat efektif 90 persen RTS menerima penuh bantuan tunai





Bantuan tunai bagi RTS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM

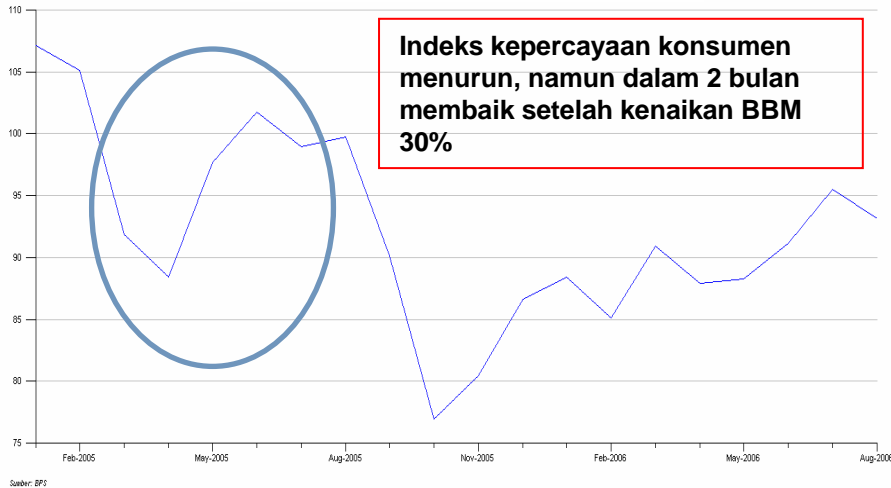
□ **Kajian oleh 56 Perguruan Tinggi → Bantuan Tunai merupakan program yang cukup baik**

- **Tepat Sasaran : 90,51%**
- **Tepat Jumlah : 97,14%**
- **Tepat Waktu : 89,10%**
- **Tingkat Pemenuhan : 75,93%**

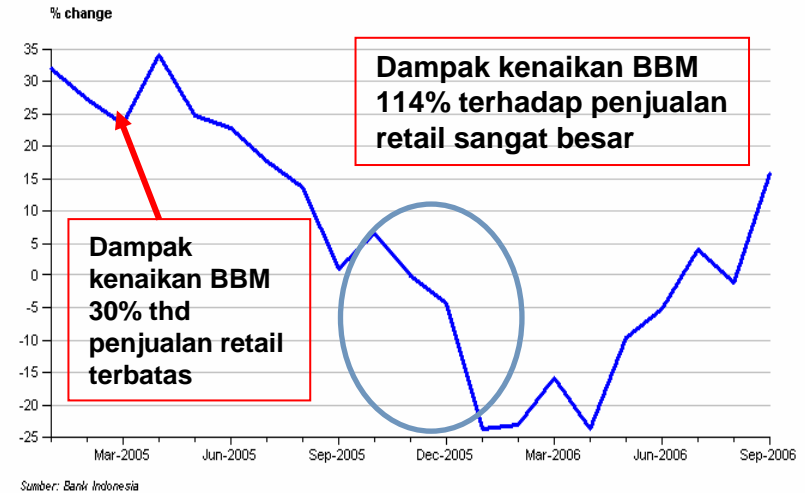


Indeks Kepercayaan Konsumen menurun namun kembali membaik dalam 2 bulan

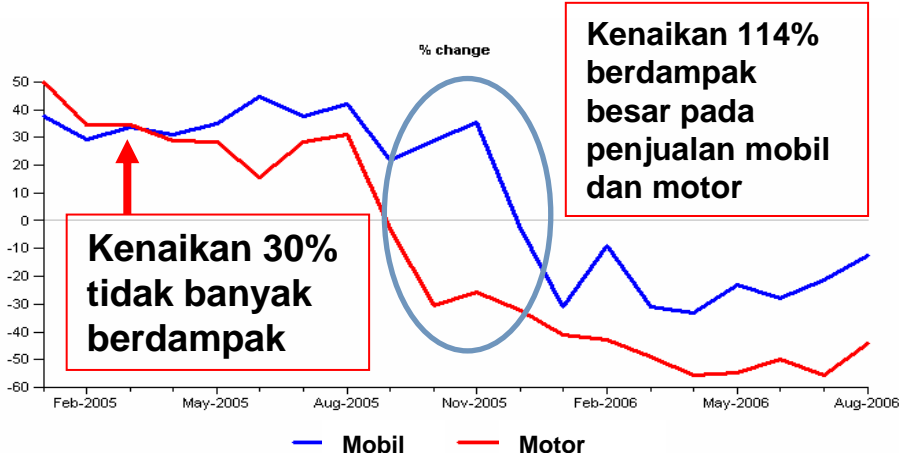
Consumer Confidence Index Point



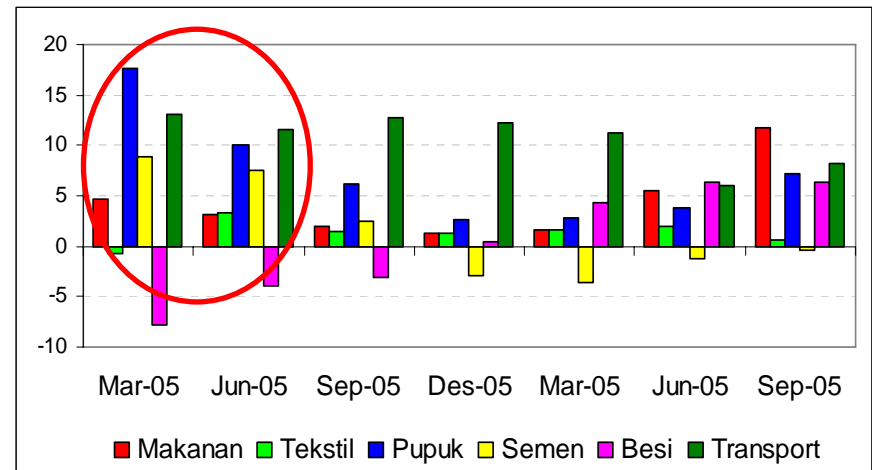
Dampak kenaikan BBM kepada penjualan retail



Dampak kenaikan BBM sebesar 30% terhadap penjualan mobil dan sepeda motor amat terbatas

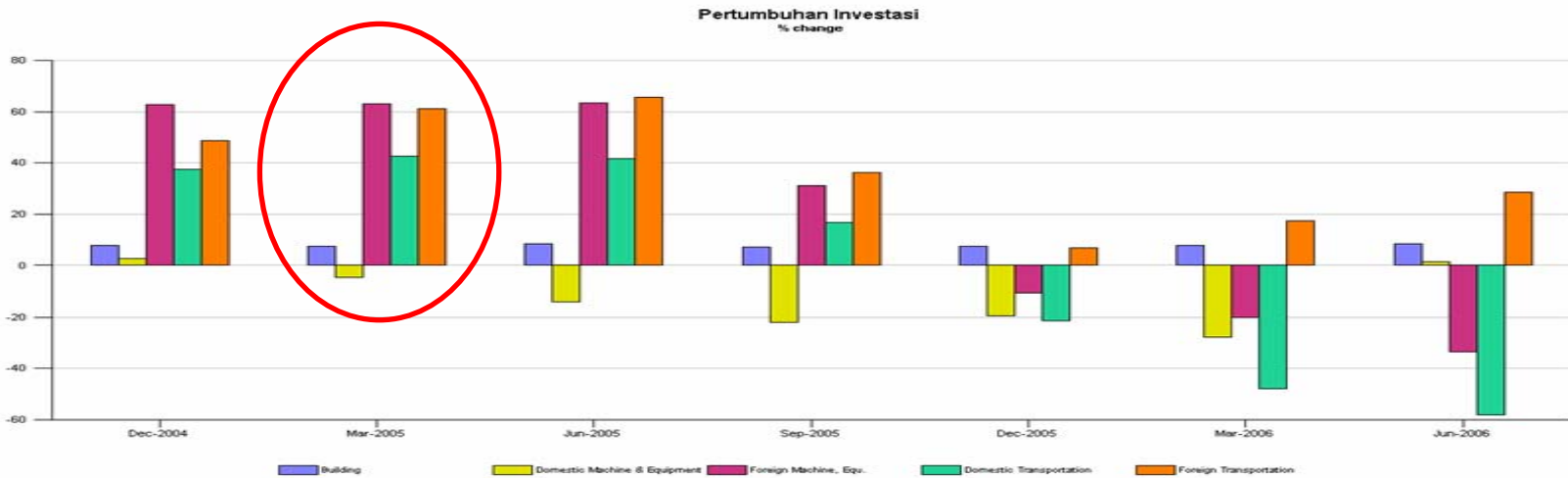


Dampak kenaikan BBM sebesar 30% paling besar terjadi untuk sektor Fertilizer, Chemicals and Semen

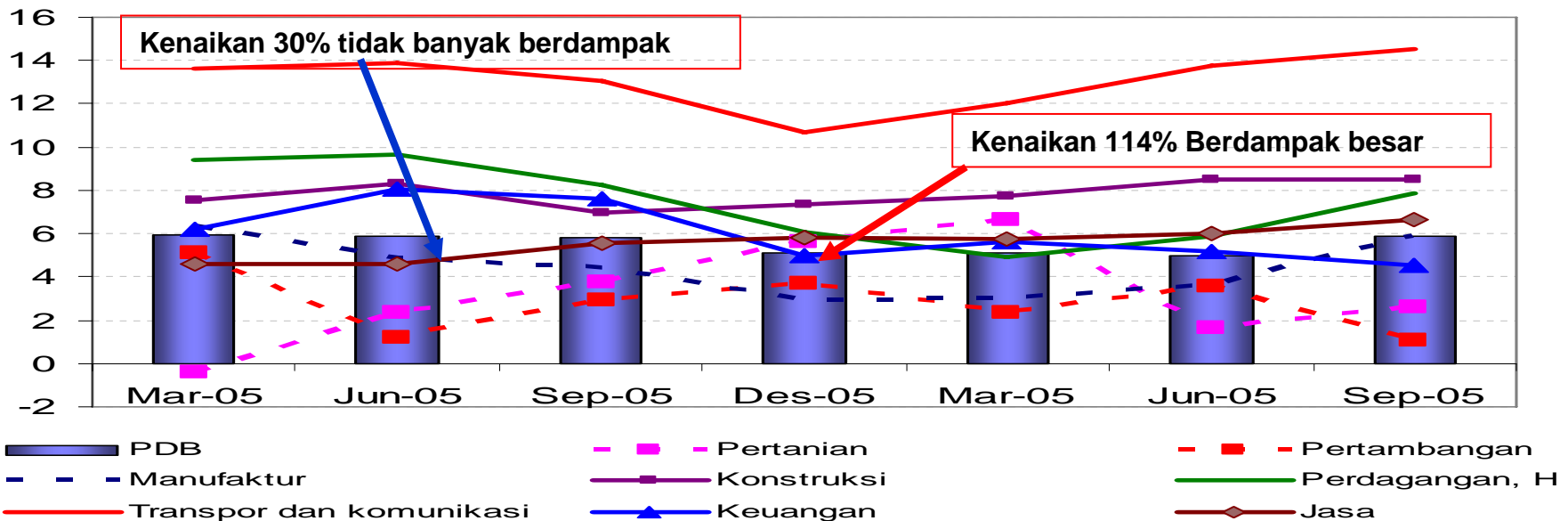




Dampak kenaikan BBM 30% terhadap Investasi terbatas

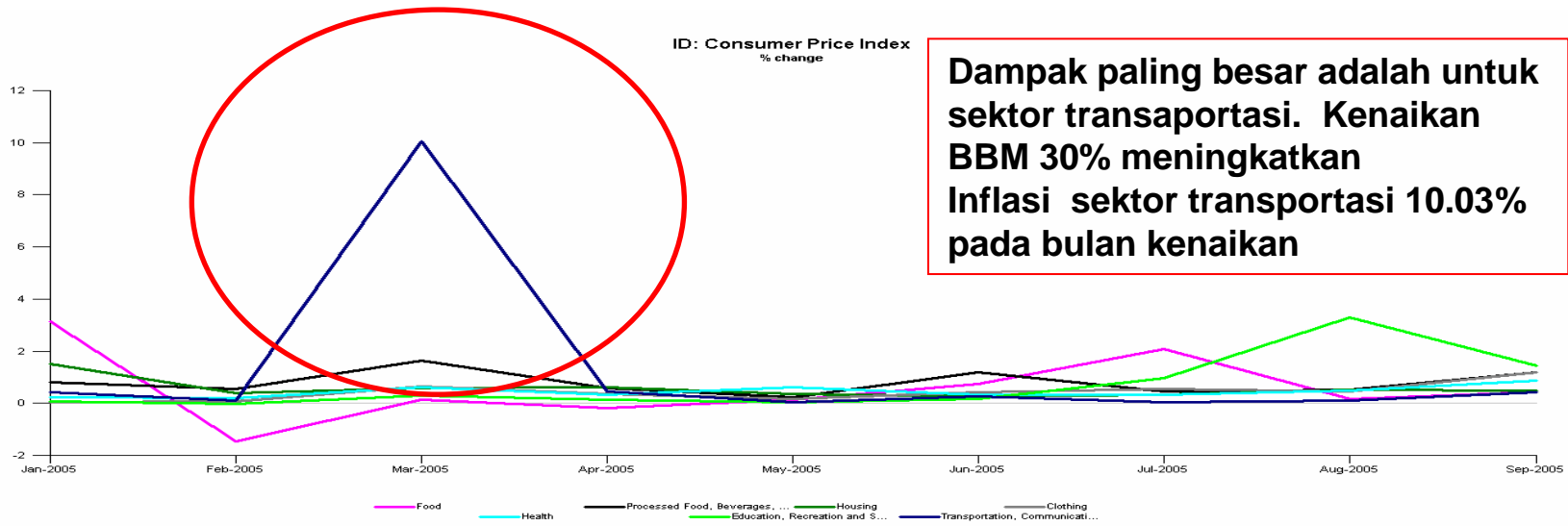


DAMPAK KEPADA PDB: kenaikan 30% tidak banyak berdampak





Dampak inflasi paling besar adalah untuk sektor transportasi, namun inflasinya menurun setelah kenaikan



DAMPAK KENAIKAN BBM MARET 2005 DAN 2008

	DAMPAK MARET 2005 (Kenaikan 30%)			DAMPAK KENAIKAN 2008		
	Maret	April	Mei	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3
INFLASI YOY	8,81	8,12	7,4	11,96	11,65	11,19
INFLASI MOM	1,91	0,34	0,21	2,7	0,44	0,35
Rp/USD	9.480	9.570	9.495	9.250	9.250	9.200
SBI	7,4	7,7	7,9	8,25	8,5	8,5

DAMPAK PENGANGGURAN MINIMAL

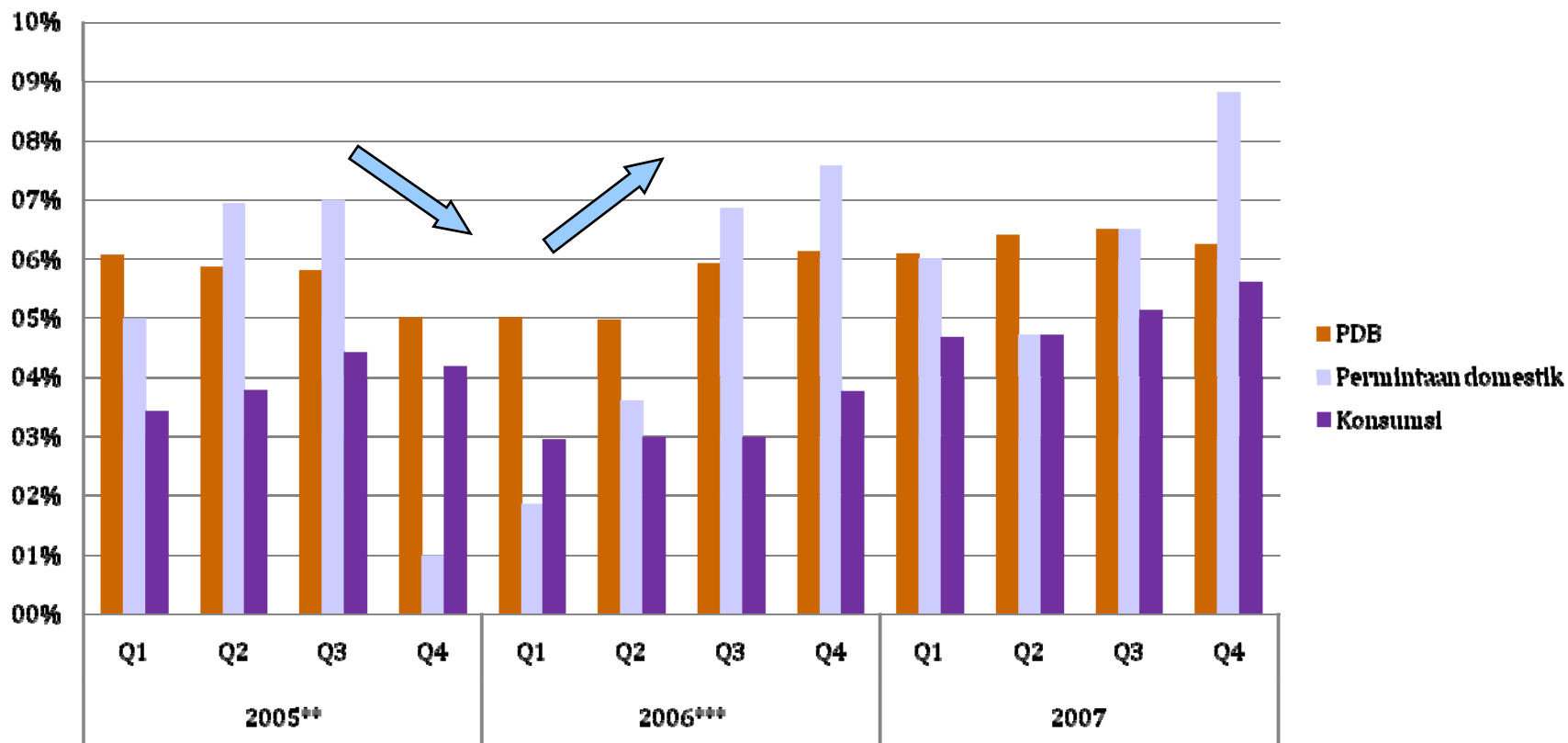
Sektor	Pengurangan Tenaga Kerja
Pertanian	39,581
Pertambangan	950
Industri Pengolahan	11,885
Listrik, Gas dan Air	168
Konstruksi	5,050
Perdagangan, Restoran dan Hotel	19,747
Transportasi dan Komunikasi	5,722
Keuangan dan Real Estate	1,344
Jasa-jasa lainnya	11,549
Jumlah	95,995

Sumber: BPS (diolah)



Pengalaman 2005: Pemulihan ekonomi akan terjadi paling lama 2 triwulan

Laju Pertumbuhan Ekonomi 2005-2007





DAMPAK KENAIKAN BBM PADA POSTUR APBN-P 2008 DAN RAPBN 2009



APBN-P 2008
(dalam triliun rupiah)

	APBN-P	Tanpa Kebijakan	Dengan Kebijakan
A. Pendapatan Negara dan Hibah	895,0	957,4	937,8
B. Belanja Negara	989,5	1.082,6	1.020,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	697,1	781,8	727,7
A. Belanja K/L	290,0	290,0	290,0
a. Penghematan belanja K/L	(30,3)	(30,3)	(30,3)
B. Belanja Non K/L	407,0	491,7	437,7
a.l. - Pembayaran Bunga Utang	94,8	101,0	95,1
- Subsidi	234,4	312,9	247,9
a. Subsidi Energi	187,1	265,6	200,6
i. BBM (Pertamina)	126,8	190,5	132,1
ii. Listrik (PLN)	60,3	75,1	68,5
b. Subsidi Non Energi	47,3	47,3	47,3
- Belanja Lain-Lain	32,1	32,1	48,9
a.l - Bantuan Langsung Tunai (BLT)	-	-	14,1
- Tambahan Cadangan Risiko	-	-	3,0
- Tambahan Raskin, Ketahanan Pangan dan lain-lain	-	-	4,2
- Tambahan KUR	-	-	1,0
II. Transfer Ke Daerah	292,4	300,9	292,4
1. Dana Perimbangan	278,4	286,9	278,4
C. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(94,5)	(125,3)	(82,3)
% defisit thd PDB	(2,1)	(2,6)	(1,8)
D. Pembiayaan (I + II)	94,5	89,7	82,3
I. Pembiayaan Dalam Negeri	107,6	107,6	97,7
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(13,1)	(17,9)	(15,4)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	(0,0)	(35,6)	0,0

PROYEKSI RAPBN 2009

(dalam triliun rupiah)



	Draft Pagu Indikatif	Tanpa Kebijakan	Dengan Kebijakan
A. Pendapatan Negara dan Hibah	940,5	1.084,0	1.024,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	940,0	1.083,4	1.024,0
1. Penerimaan Perpajakan	713,4	752,8	723,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	226,6	330,6	300,1
II. Hibah	0,6	0,6	0,5
B. Belanja Negara	1.031,3	1.242,9	1.105,9
I. Belanja Pemerintah Pusat	706,6	865,4	777,7
1. Belanja K/L	311,5	311,5	311,5
2. Belanja Non K/L	395,2	553,9	466,2
- Pembayaran Bunga Utang	104,4	121,6	102,5
- Subsidi	203,1	344,7	233,6
i. Subsidi Energi	152,8	292,5	183,8
- BBM (Pertamina)	97,1	204,1	105,5
- Listrik (PLN)	55,7	88,4	78,3
ii. Subsidi Non Energi	50,3	52,2	49,8
- Belanja Lainnya	28,9	28,9	71,4
a.I - Bantuan Langsung Tunai	-	-	21,6
II. Transfer Ke Daerah	324,7	377,5	328,2
C. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(90,8)	(158,9)	(81,3)
% Thd PDB	(1,8)	(2,9)	(1,5)
D. Pembiayaan (I + II)	90,8	89,4	81,3
I. Pembiayaan Dalam Negeri	107,2	107,2	97,3
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(16,4)	(17,8)	(15,9)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	(0,0)	(69,5)	-



KEBIJAKAN FISKAL 2009 TERKAIT DENGAN SUBSIDI BBM

1. Perubahan formula DAU dengan memperhitungkan beban subsidi BBM sebagai faktor pengurang penerimaan dalam negeri neto
2. Penyediaan BLT untuk 11 bulan sebesar Rp21,6T
3. Penerapan kebijakan pengendalian konsumsi BBM:
 - Smart Card yang telah dimulai dan diujicoba dan pendataan di akhir tahun 2008,
 - Akselerasi konversi Mitan ke LPG plus Kartu Kendali
 - Kendaraan yang tidak mendapatkan Smart Card membayar BBM pada harga keekonomian secara bertahap
4. Penerapan alokasi maksimum subsidi BBM dalam APBN 2009 dengan memberikan opsi pada pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM, subsidi, penyesuaian harga, dan kebijakan fiskal terkait lainnya
5. Efisiensi Pertamina dan PLN melalui penurunan alpha Pertamina dan losses PLN serta percepatan pembangunan listrik 10.000MW berbahan bakar batubara



TERIMA KASIH